



INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SIAK

2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK**

bekerja sama dengan



**PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK**



INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

2022

KABUPATEN SIAK



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK

bekerja sama dengan



PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022

Diterbitkan oleh:

Pemerintah Kabupaten Siak
Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Pengarah:

Ari Setiadi Gunawan, B.St, S.H.

Penanggung Jawab Teknis:

Nelli Yuliarsi, SST.

Penyunting/Editor:

Nelli Yuliarsi, SST.

Penulis dan Pengolahan Data:

Nelli Yuliarsi, SST.
Muti Nurjannah Fitri, S.Tr.Stat.

Desain *Layout*:

Muti Nurjannah Fitri, S.Tr.Stat.

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK



Bupati Siak
Drs. H. Alfredri, M.Si



Wakil Bupati Siak
H. Husni Merza, BBA., M.M.

SAMBUTAN BUPATI KABUPATEN SIAK

‘Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu’ khususnya dalam upaya untuk mewujudkan misi ke-5 yaitu ‘Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Pemajuan Budaya Melayu.’, pemerintah Kabupaten Siak pada tahun 2022 menyusun suatu Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai ukuran untuk melihat gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan guna merumuskan kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Siak 2022 menyajikan berbagai aspek yang utamanya diambil dari 7 dimensi penyusun indeks yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Siak ini disusun dengan berlandaskan dari kerangka kerja yang dikembangkan oleh UNICEF.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Siak Sri Indrapura. 1 Desember 2022

Bupati Siak

Drs. H. Alfredri, M.Si

SAMBUTAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN SIAK

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Siak 2022 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang bertujuan untuk melihat capaian kinerja di bidang kebudayaan wilayah Kabupaten Siak.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek yang utamanya diambil dari 7 dimensi penyusun indeks yaitu yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Siak ini disusun dengan berlandaskan dari kerangka kerja yang dikembangkan oleh UNICEF.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Siak Sri Indrapura. 1 Desember 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Siak

Romy Lesmana Dermawan, A.P. M.Si

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Sambutan Bupati Kabupaten Siak.....	vi
Sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Siak.....	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Pendahuluan	3
Bab 2. Metodologi Penghitungan	7
2.1 Pemetaan Indikator Penyusun IPK	9
2.2 Proses Seleksi Indikator	10
2.3 Normalisasi Indikator	11
2.4 Penentuan Bobot Tiap Dimensi	16
2.5 Penghitungan IPK	18
Bab 3. Hasil Penghitungan IPK Tahun 2022	21
3.1 IPK Kabupaten Siak	22
3.2 IPK Provinsi Riau	25
3.3 IPK Nasional	27
Daftar Pustaka	31
Daftar Lampiran	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Indikator Hasil Seleksi, Sumber, dan Ketersediaan Data IPK Kabupaten Siak, 2022	12
Tabel 2.2	Pembobotan Dimensi untuk Mengukur IPK	18
Tabel 3.1	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Dimensi Kabupaten Siak, 2022	23
Tabel 3.2	IPK Provinsi Riau Menurut Dimensi dan IPK Nasional, 2021	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi di Indonesia, 2021	25
Gambar 3.2 Indeks Dimensi Penyusun IPK Indonesia, 2021	28



BAB 1 PENDAHULUAN



Nilai budaya dan sikap mental (etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang) bisa menjadi pendorong produktivitas



Kedua nilai tersebut merupakan faktor penentu dalam mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan.

Upaya menjadikan kebudayaan sebagai investasi membangun masa depan dan peradaban



Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017
tentang pemajuan Kebudayaan



Indeks
Pembangunan
Kebudayaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENDAHULUAN

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. Sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi.

Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan.

Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

- (1) dimensi ekonomi budaya;
- (2) dimensi pendidikan;
- (3) dimensi ketahanan sosial budaya;
- (4) dimensi warisan budaya;
- (5) dimensi ekspresi budaya;
- (6) dimensi budaya literasi; dan
- (7) dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021, pembangunan kebudayaan Indonesia cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tingkat nasional dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 51,90. Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: dimensi ekonomi budaya (20,69), dimensi pendidikan (68,71), dimensi ketahanan sosial budaya (66,83), dimensi warisan budaya (46,63), dimensi ekspresi budaya (27,13), dimensi budaya literasi (54,29), dan dimensi kesetaraan gender (58,55).

Dimensi ketahanan sosial budaya memiliki nilai paling tinggi, sementara dimensi ekonomi budaya memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan Indonesia dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan.

Sementara nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tingkat provinsi menunjukkan, bahwa masih terdapat 21 (dua puluh satu) provinsi memiliki Indeks Pembangunan Kebudayaan di bawah angka nasional. Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan paling tinggi (73,79), dan Provinsi Papua memiliki Indeks Pembangunan Kebudayaan paling rendah (46,25).

Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan untuk Provinsi Riau adalah sebesar 54,20. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan aspek-aspek kebudayaan di Provinsi Riau secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut: dimensi ekonomi budaya (26,35), dimensi pendidikan (74,27), dimensi

ketahanan sosial budaya (70,07), dimensi warisan budaya (47,47), dimensi ekspresi budaya (22,31), dimensi budaya literasi (56,39), dan dimensi kesetaraan gender (59,20). Jika dilihat dari masing-masing dimensi, seluruh dimensi terlihat menunjukkan angka Indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional kecuali pada dimensi ekspresi budaya dimana Provinsi Riau tertinggal 4,28 persen dibandingkan angka Nasional.

Dengan diterbitkannya Indeks Pembangunan Kebudayaan ini, diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. Publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang knowledge-based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait pembangunan kebudayaan.



BAB 2 METODOLOGI PERHITUNGAN

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun dengan mengacu pada *framework Culture Development Indicators* (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO.



7 DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

- Dimensi 1 Ekonomi Budaya
- Dimensi 2 Pendidikan
- Dimensi 3 Ketahanan Sosial Budaya
- Dimensi 4 Warisan Budaya
- Dimensi 5 Ekspresi Budaya
- Dimensi 6 Budaya Literasi
- Dimensi 7 Gender



BAB II

METODOLOGI PENGHITUNGAN

2.1 PEMETAAN INDIKATOR PENYUSUN IPK

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun dengan mengacu pada *framework Culture Development Indicators* (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. Berdasarkan *framework* tersebut, CDIs disusun oleh 22 indikator yang dikelompokkan dalam tujuh dimensi. Tujuh dimensi tersebut diimplementasikan secara global, meliputi Dimensi Ekonomi, Pendidikan, Pemerintahan, Partisipasi Sosial, Keadilan Gender, Komunikasi, dan Warisan Budaya.

Berdasarkan dimensi CDIs tersebut, dan merujuk pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dilakukan pemetaan indikator kandidat penyusun IPK, sehingga diperoleh 40 indikator awal penyusun IPK, yang dikelompokkan dalam 8 dimensi, yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Gender, dan Tata Kelola Budaya. Pemetaan indikator kandidat tiap dimensi tersebut dilakukan secara trilateral antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di semua provinsi serta ketersediaan data secara kontinyu. Indikator indikator dalam dimensi tersebut datanya bersumber dari hasil survei BPS dan data dari kementerian lainnya. Data yang berasal dari BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR 2022, Susenas Modul sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021, Susenas Modul Ketahanan Sosial (Hansos) 2020, Survei Sosial Ekonomi Daerah Modul Sosial Budaya dan Pendidikan dan Survei Angkatan Kerja Nasional 2022. Sedangkan data dari kementerian lainnya berupa data registrasi

yang dikumpulkan oleh Kemendikbud, serta data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah dipublikasikan pada Publikasi Statistik Indonesia 2022

2.2 PROSES SELEKSI INDIKATOR

Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator-indikator mana yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks. Tujuannya, agar diperoleh IPK dengan komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan. Pemilihan indikator diawali dengan identifikasi indikator kandidat yang secara substantif sesuai dengan konsep dimensi yang dibangun. Indikator yang diambil hendaknya mempertimbangkan aspek ketersediaan data. Pada proses identifikasi indikator penyusun IPK diperoleh 40 indikator kandidat.

Selanjutnya, dilakukan proses seleksi indikator terhadap 40 indikator kandidat menggunakan teknik statistik analisis faktor. Melalui analisis faktor dapat diketahui matriks hubungan antar sejumlah indikator. Selanjutnya matriks hubungan tersebut diuji dengan *Measure Sampling Adequacy* (MSA). Pengujian ini dilakukan untuk menyeleksi indikator-indikator mana yang akan masuk dalam penghitungan IPK. Suatu indikator akan masuk sebagai indikator penyusun indeks apabila memiliki hubungan yang kuat dengan indikator lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai MSA 0,5 ke atas ($MSA \geq 0,5$). Sebaliknya, indikator yang memiliki hubungan lemah (nilai $MSA < 0,5$) akan dikeluarkan dari penghitungan IPK. Analisis faktor ini dilakukan terhadap masing-masing dimensi secara terpisah.

Proses pemilihan indikator tidak mutlak hanya berdasarkan teknik statistik. Tahapan lain yang juga digunakan dalam proses seleksi variabel adalah dengan mempertimbangkan teori substansi dari indikator tersebut. Pertimbangan ini dilakukan melalui diskusi oleh para ahli atau disebut *expert judgment*. Apabila secara teori substansi indikator tersebut penting sebagai

penyusun indeks, maka indikator tersebut akan tetap digunakan meskipun secara teknik statistik dianggap tidak layak masuk sebagai penyusun indeks. Dalam penyusunan IPK, selain menggunakan analisis faktor, seleksi indikator ini dilakukan melalui diskusi para ahli terkait dimensi serta indikator-indikator yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan. Beberapa ahli yang turut serta dalam proses diskusi diantaranya perwakilan dari Bidang Penelitian Kebudayaan, Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan, serta Bidang Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan Bappenas. Salah satu yang menjadi dasar penentuan indikator tersebut adalah target RPJMN serta program-program pemerintah terkait pembangunan kebudayaan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil seleksi dari analisis faktor dan pertimbangan teori substansi oleh para ahli, terpilih 31 indikator hasil yang relevan dalam 7 dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2.3 NORMALISASI INDIKATOR

Sebelum penghitungan indeks, tahapan yang harus dilakukan adalah normalisasi data. Tujuan dari normalisasi data adalah agar semua indikator penyusun indeks memiliki satuan, arah dan rentang yang sama sebagai standarisasi, sehingga dapat diolah secara statistik.

Metode normalisasi yang digunakan dalam penghitungan IPK adalah metode Max-Min. Untuk menggunakan metode ini, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan nilai minimum dan maksimum masing-masing indikator. Nilai maksimum menggambarkan target yang ingin dicapai dari indikator tersebut. Penentuan nilai minimum dan maksimum dapat mengacu pada literatur yang sudah digunakan secara global, atau berdasarkan target-target yang ditetapkan dalam RPJMN. Apabila tidak ada dasar untuk penentuan nilai minimum dan maksimum, maka dapat digunakan pendekatan data empiris yaitu dengan memanfaatkan nilai tertinggi dari sebaran data per provinsi ditambah

dengan standard deviasi. Tabel 2.1. menunjukkan nilai maksimum dan minimum setiap indikator yang digunakan dalam penghitungan IPK 2022.

Tabel 2.1. Daftar Indikator Hasil Seleksi, Sumber, dan Ketersediaan Data IPK Kabupaten Siak 2022

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dimensi 1. Ekonomi Budaya (D1)						
1	X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0	1	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
Dimensi 2. Pendidikan (D2)						
2	X2.1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+	0	15	Standar UN dan sudah digunakan di IPM	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
3	X2.2	Harapan lama sekolah penduduk usia 7+	0	18	Standar UN dan sudah digunakan di IPM	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
4	X2.3	Angka Kesiapan Sekolah	0	100	Standar	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
5	X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian	0	45	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Kemdikbud setiap tahun, nasional dan provinsi
6	X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	0	100	Standar	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
7	X2.6	Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah	0	100	Standar	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
Dimensi 3. Ketahanan Sosial Budaya (D3)						
8	X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100	Standar	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
9	X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan	0	100	Standar	Susenas MSBP, setiap tiga tahun

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal				sekali, nasional dan provinsi
10	X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama	0	100	Standar	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
11	X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku	0	100	Standar	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
12	X3.5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	0	100	Standar	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
13	X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	0	100	Standar	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
14	X3.7	Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	0	50	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas Hansos, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
15	X3.8	Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga	0	100	Standar	Susenas Hansos, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
Dimensi 4. Warisan Budaya (D4)						
16	X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	0	50	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
17	X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	0	50	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
18	X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	0	100	Standar	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
19	X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	0	70	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	0	30	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
21	X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	0	95	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
22	X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.	0	30	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
23	X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	0	20	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
24	X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	0	7	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
25	X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	0	45	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
Dimensi 6. Budaya Literasi (D6)						
26	X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	0	70	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas MSBP, setiap tiga tahun sekali, nasional dan provinsi
27	X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	0	85	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
28	X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat	0	25	Nilai maksimum empiris+ standard deviasi	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
Dimensi 7. Gender (D7)						

No	Keterangan	Indikator IPK	Nilai Min	Nilai Max	Dasar Penentuan Nilai Max	Sumber Data dan Ketersediaan Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	0	100	Standar	Sakernas, setiap tahun, nasional dan provinsi
30	X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	0	100	Standar	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
31	X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	0	100	Standar	KPU-BPS, setiap tahun, nasional dan provinsi

Selanjutnya, setiap indikator diubah dalam rentang yang sama yaitu antara 0 sampai 100. Nilai indikator yang berada di bawah nilai minimum ditetapkan sebagai 0 dan setiap nilai indikator yang berada di atas nilai maksimum ditetapkan sebagai 100, dan semuanya akan diukur merata antara 0 dan 100.

Dalam proses normalisasi perlu mempertimbangkan sifat dari masing-masing indikator, apakah arahnya positif atau negatif. Suatu indikator memiliki arah positif jika semakin besar nilainya mengindikasikan kondisi yang semakin membaik. Sebaliknya, suatu indikator memiliki arah negatif jika semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin memburuk. Selanjutnya, indikator harus dinormalisasi menggunakan Persamaan 1 untuk data positif dan Persamaan 2 untuk data negatif. Adapun persamaan yang digunakan dalam normalisasi nilai indikator adalah sebagai berikut:

Persamaan 1

(untuk indikator yang bersifat positif):

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

Persamaan 2

(untuk indikator yang bersifat negatif):

$$SX_i = 100 - \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

Keterangan :

SX_i : nilai indikator **i** yang sudah dinormalisasi

X_i : adalah nilai indikator **i** (empiris)

$X_{i.min}$: adalah nilai minimal indikator **i** (ditetapkan)

$X_{i.max}$: adalah nilai maksimal indikator **i** (ditetapkan)

2.4 PENENTUAN BOBOT TIAP DIMENSI

Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu, kesepakatan di antara para pakar tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan. Adapun beberapa metode pembobotan yang ada adalah sebagai berikut:

a. Penilaian Para Pakar

Penilaian para pakar adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan tinjauan secara cepat berdasarkan pengetahuan para pakar terkait suatu aspek tertentu dalam mengukur indeks.

b. Proses Hierarki Analisis (*Analytical Hierarchy Process/AHP*)

Proses Hierarki Analisis (AHP) adalah teknik yang terstruktur untuk mengelola dan menganalisis keputusan yang kompleks. AHP membantu para pengambil keputusan untuk menentukan pembobotan yang terbaik untuk dimensi dan indikator dengan melakukan analisis masalah dalam kerangka kerja yang komprehensif dan rasional.

c. **Pendekatan Keuntungan dari Keraguan** (*Benefit of the doubt approach/ BOD*)

Pendekatan ini adalah aplikasi dari *Data Envelopment Analysis* (DEA) terhadap indikator komposit berdasarkan keuntungan dari setiap dimensi dan indikator.

d. **Pendapat umum/ opini publik**

Metode opini publik merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu negara mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran mayoritas masyarakat.

e. **Proses Alokasi Anggaran** (*Budget Allocation Process/ BAP*)

Proses Alokasi Anggaran merupakan metode pembobotan indikator berdasarkan persentase dari anggaran untuk setiap dimensi dan indikator.

f. **Metode Statistik Multivariasi** (*Multivariate Statistical Methods*)

Metode ini digunakan untuk menganalisis gabungan perilaku dari berbagai variabel (indikator) yang dipilih secara random. Keanekaragaman dari sebuah variabel random akan dievaluasi secara bersamaan untuk mendeteksi perilaku dari berbagai indikator. Beberapa kemungkinan metode statistik multivariatif untuk menentukan indeks adalah sebagai berikut: *Principle components analysis* (PCA), *Factor analysis*, *Cluster analysis*, *Multivariate analysis of variance* (MANOVA), *Discriminant analysis*, *Data envelopment analysis* (DEA), *Unobserved components model* (UCM) dan *Conjoint analysis* (CA).

Dalam penyusunan IPK, pembobotan dimensi menggunakan metode statistik multivariat (*multivariate statistical methods*) melalui analisis faktor dan dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan pendapat para pakar. Bobot yang digunakan untuk masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pembobotan Dimensi untuk Mengukur IPK Kabupaten Siak Tahun 2022

Dimensi	% Bobot
(1)	(2)
Dimensi 1 Ekonomi Budaya	10%
Dimensi 2 Pendidikan	20%
Dimensi 3 Ketahanan Sosial Budaya	20%
Dimensi 4 Warisan Budaya	25%
Dimensi 5 Ekspresi Budaya	10%
Dimensi 6 Budaya Literasi	10%
Dimensi 7 Gender	5%

2.5 PENGHITUNGAN IPK

IPK adalah penghitungan nilai indeks dimensi. Indeks dimensi diperoleh dengan cara menghitung nilai indikator dengan mengasumsikan bobot masing-masing indikator sama, sehingga persamaan yang digunakan sebagai berikut:

Persamaan 1

$$\text{Indeks } D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan :

SX_{ji} adalah nilai indikator *i* pada dimensi ke-*j* yang sudah dinormalisasi

n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke-*j*

Indeks D_j adalah indeks Dimensi ke-*j*

Selanjutnya nilai IPK dihitung dengan cara menghitung indeks dimensi dan menambahkan pembobotan untuk masing-masing dimensi. Sehingga penghitungan IPK mempertimbangkan bobot masing-masing dimensi. Penghitungan menggunakan persamaan 2.

Persamaan 2 :

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times \text{Indeks } D_j)$$

Keterangan :

IPK : Indeks Pembangunan Kebudayaan

D_j : adalah Dimensi ke-j

W_j : adalah Bobot Dimensi ke-j

Nilai akhir dari hasil penghitungan IPK dalam Persamaan 2 digunakan untuk mengukur IPK Indonesia baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal ini adalah Kabupaten Siak.



BAB 3 HASIL PERHITUNGAN IPK

“ Kinerja Pembangunan kebudayaan di kabupaten Siak sebesar 55,22. ”



BAB III

HASIL PENGHITUNGAN IPK TAHUN 2022

3.1 IPK KABUPATEN SIAK

IPK Kabupaten Siak dihitung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak sebagai enumerator atau pengumpul data melalui kegiatan Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Tahun 2022 yang didasarkan dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional Kuesioner Modul Sosial dan Budaya Tahun 2021. Kabupaten Siak, merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan sehingga bisa dibilang Pemerintah Daerah Kabupaten Siak adalah pelopor keperdulian budaya di Provinsi Riau. Tentu saja Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau juga diharapkan dapat menghitung IPK sehingga kedepannya pemberdayaan kebudayaan di Provinsi Riau semakin dapat dilestarikan.

Untuk mendapatkan angka masing-masing indikator, BPS menggunakan gabungan data dari SUSEDA 2022, Susenas Maret 2022 Modul Kor, Sakernas Agustus 2022 dan data-data lain yang dikumpulkan dari OPD di Kabupaten Siak sehingga menghasilkan nilai Indeks yang disusun oleh 31 indikator dan 7 dimensi.

Tabel 3.2 menunjukkan hasil Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Siak Tahun 2022. Data tidak dapat dibandingkan dengan angka Provinsi Riau karena sejatinya IPK Provinsi Riau tahun 2022 belum di rilis secara resmi.

Tabel 3.1 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Siak per Dimensi, 2022

Dimensi	Nilai IPK Kabupaten Siak
(1)	(2)
Ekonomi Budaya	27,98
Pendidikan	74,36
Ketahanan Sosial Budaya	71,07
Warisan Budaya	46,54
Ekspresi Budaya	26,78
Budaya Literasi	57,23
Gender	50,13
IPK Total	55,22

Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa IPK Kabupaten Siak pada tahun 2022 adalah sebesar 55,22. Nilai ini jika dibandingkan dengan IPK Provinsi Riau pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Siak memiliki IPK yang lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Riau (54,20). Walaupun begitu kinerja pembangunan kebudayaan di kabupaten Siak masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya dalam memformulasikan kebijakan bidang kebudayaan untuk mencapai kemajuan bangsa yang mempertahankan kesitimewaan dan ciri khas negara Indonesia. Capaian pada setiap dimensi penyusun IPK masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara dimensi satu dengan lainnya. Capaian tertinggi pada dimensi Pendidikan dan terendah terdapat pada idmensi ekspresi budaya. Penjelasan pada setiap dimensi IPK diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 DIMENSI EKONOMI BUDAYA

Hanya ada 0,28% penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Siak pada tahun 2022 yang memiliki sumber penghasilan yang berasal dari keterlibatan mereka sebagai pelaku pertunjukkan seni. Meskipun nilainya lebih besar dari angka Provinsi di tahun 2021 (0,26 persen), namun angka tersebut masih sangat jauh dari target (1 persen).

3.1.2 DIMENSI PENDIDIKAN

Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Siak sekitar 8,92 tahun. Pemberian beasiswa dari pemerintah daerah setempat khususnya bagi penduduk 15 tahun ke atas yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi mungkin dapat membantu meningkatkan indikator ini.

3.1.3 DIMENSI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA

Terdapat sekitar 38,16 % penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Siak yang mengikuti gotong royong. Nilai indikator tersebut paling kecil dibandingkan indikator lainnya dalam dimensi ketahanan sosial budaya. Program prioritas diperlukan agar nilai persentase tersebut dapat meningkat.

3.1.4 DIMENSI WARISAN BUDAYA

Meskipun persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Riau ada sekitar 3,66%, namun angka tersebut masih jauh dari angka target (50,00 %).

3.1.5 DIMENSI EKSPRESI BUDAYA

Terdapat sekitar 1,89 % penduduk 10 tahun ke atas di Riau yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni. Rendahnya indikator ini menjadi penyumbang terbesar mengapa dimensi ekspresi budaya nilainya paling rendah.

3.1.6 DIMENSI BUDAYA LITERASI

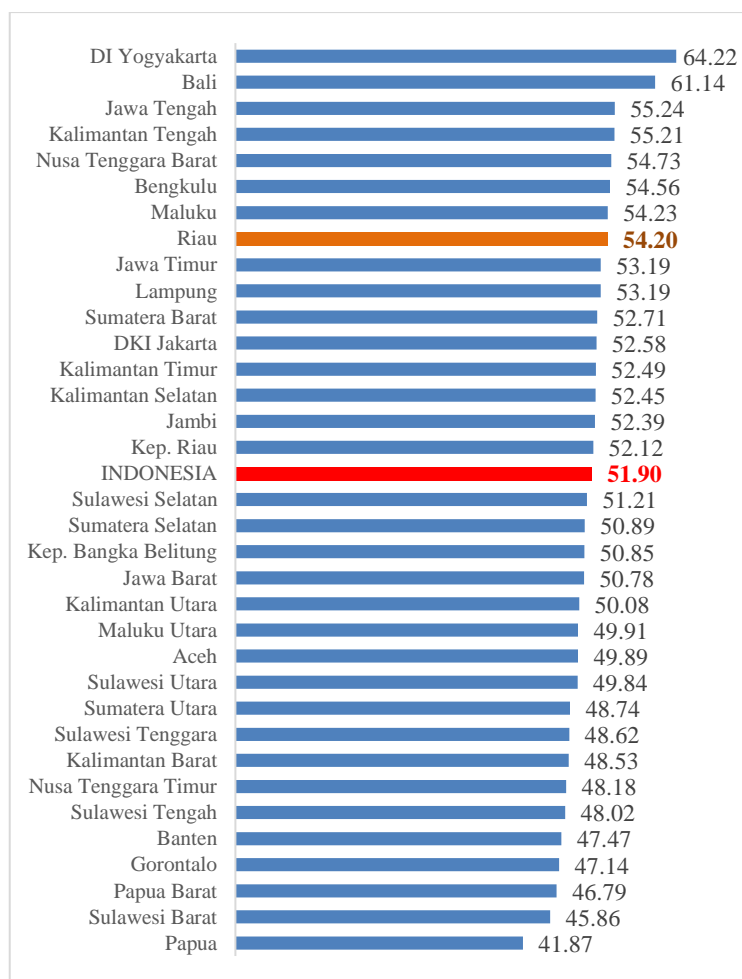
Hanya sekitar 12,96% penduduk usia 10 tahun ke atas di Riau yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Tidak hanya siswa atau mahasiswa yang dapat mengunjungi perpustakaan, pemerintah dapat mensosialisasikan perpustakaan kepada masyarakat lainnya.

3.1.7 DIMENSI GENDER

Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki di Riau hanya mencapai 12.89. Angka tersebut berada jauh dibawah angka provinsi (21,19) dan masih masih sangat jauh dari target (100,00).

3.2 IPK PROVINSI RIAU

IPK yang telah dihitung saat ini sudah dapat dipetakan hingga pada level Provinsi bahkan Kabupaten/Kota. Adapun jika dilihat pada level Provinsi pada Gambar 3.2 telah disajikan nilai IPK pada tahun 2021 untuk masing-masing Provinsi di Indonesia sebagai berikut:



Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi di Indonesia, 2021

Jika diperhatikan lebih seksama, meskipun Bali maupun Jawa Tengah termasuk dalam tiga provinsi dengan capaian IPK tertinggi, nyatanya kesenjangan antara kedua provinsi ini terhadap DI Yogyakarta cukup tinggi. Berkaca dari kondisi ini, terlihat bahwa sentralisasi pembangunan kebudayaan masih terpusat di wilayah barat dan tengah Indonesia, sementara wilayah timur masih mengalami ketertinggalan dan membutuhkan akselerasi pembangunan kebudayaan yang berkesinambungan. Penjelasan mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing provinsi digambarkan secara komprehensif pada pembahasan selanjutnya.

Untuk Provinsi Riau sendiri memiliki nilai IPK yang cukup tinggi yaitu 54,20. Angka ini menjadikan Provinsi Riau dengan nilai IPK tertinggi ke-8 dari 34 Provinsi di Indonesia. Meskipun nilai IPK sudah berada di atas angka nasional, namun posisi Provinsi Riau dapat terbilang masih cukup jauh dibandingkan Provinsi DI Yogyakarta dan Bali yang sudah mencapai nilai di atas angka 60.

Kemudian jika dilihat untuk masing-masing dimensi pada Tabel 3.1, didapatkan angka sebagai berikut:

Tabel 3.2 IPK Provinsi Riau Menurut Dimensi dan IPK Nasional

Dimensi	Nilai Indeks		Ranking Riau
	Indonesia	Riau	
(1)	(2)	(3)	(4)
Ekonomi Budaya	20,69	26,35	4
Pendidikan	68,71	74,27	9
Ketahanan Sosial Budaya	68,83	70,07	19
Warisan Budaya	46,63	47,47	12
Ekspresi Budaya	27,13	22,31	13
Budaya Literasi	54,29	56,39	9
Gender	58,55	59,20	5
IPK Total	51,90	54,20	7

Enam dimensi pembentuk IPK Riau memiliki nilai indeks di atas angka nasional. Hanya satu dimensi saja yaitu dimensi ekspresi budaya yang nilainya berada di bawah angka nasional. Meskipun demikian nilai dimensi ekspresi budaya Riau berada di peringkat ke-13 dari 34 provinsi.

3.3 IPK NASIONAL

Pembangunan kebudayaan bukan hanya mampu berperan terhadap peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan semata, akan tetapi mampu memberikan investasi tersendiri terhadap peradaban bangsa. Menyadari hal tersebut, pembangunan kebudayaan mulai menjadi perhatian tersendiri guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional, salah satunya melalui IPK

Sebagai salah satu instrumen yang mampu mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kebudayaan secara komprehensif, IPK merupakan wujud nyata perhatian pemerintah bersama para pemerhati budaya dalam menjaga sinergitas kontribusi unsur kebudayaan pada pembangunan nasional. Untuk pertama kalinya penghitungan IPK dilakukan pada tahun 2018 dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang sebagian besar berasal dari Susenas MSBP 2018 dengan menggunakan pendekatan rumah tangga. Setelah itu, penghitungan IPK pada tingkat Nasional dan Provinsi terus dilakukan secara rutin hingga tahun 2022 dimana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama Kementerian PPN/Bappenas (Badan Perencanaan Nasional) dan Badan Pusat Statistik telah merilis nilai IPK hingga kondisi satu (1) tahun sebelumnya atau tahun 2021.

Capaian IPK Indonesia sebesar 51,90, sebagaimana yang tersaji pada Gambar 3.1. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Indonesia masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal.

IPK 2021 mengakomodasi segenap unsur kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari yang dikelompokkan kedalam tujuh dimensi, yaitu: dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi gender. Ketujuh dimensi penyusun tersebut merujuk pada standar baku pengukuran kebudayaan secara internasional yang terdapat pada Cultural Development Indicators (CDIs) yang digagas oleh UNESCO dengan melakukan beberapa adaptasi sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan Indonesia. Selain itu, IPK juga diharapkan dapat memuat pokok-pokok kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



Gambar 3.2 Indeks Dimensi Penyusun IPK Indonesia, 2021

Jika melihat pada dimensi yang dihasilkan, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara dimensi satu dengan lainnya (Gambar 3.2). Dua dimensi dengan hasil tertinggi adalah dimensi Ketahanan Sosial dan Budaya (66,83) dan dimensi Pendidikan (68,71). Tingginya nilai pada dimensi ketahanan sosial budaya menunjukkan cukup baiknya kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta

praktik budayanya yang relevan didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Sedangkan dimensi Ekonomi Budaya menghasilkan nilai indeks terendah (20,69) yang menandakan bahwa masih cukup rendahnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Adapun tujuh dimensi yang digunakan dalam mengukur capaian IPK dibentuk oleh beragam indikator yang menghasilkan variasi capaian yang berbeda-beda, misalnya dimensi ekonomi budaya hanya dibentuk oleh satu indikator saja, yakni penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang nilainya relatif rendah. Sementara itu, dimensi pendidikan dibentuk oleh enam indikator dimana penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin yang masih bersekolah menjadi indikator yang paling besar sumbangannya dalam membentuk dimensi ini. Dimensi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang seni, budaya, dan bahasa. Unsur pendidikan yang masuk dalam dimensi ini tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- 2023 Museum. Museum Budaya Dan Sejarah Siak Balai Rung Sri, Siak. Siak Sri Indrapura
<https://museum.co.id/>
- 2023 Antara News. Kemendikbud Kukuhkan Siak Sebagai Cagar Budaya Nasional. Siak Sri Indrapura
<https://www.antaranews.com/>
- 2022 Siak Dalam Angka 2022
Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik – Kabupaten Siak
- 2022 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak 2022
Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik – Kabupaten Siak
- 2022 Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022
Siak Sri Indrapura: Badan Pusat Statistik – Kabupaten Siak
- 2021 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
<https://ipk.kemdikbud.go.id>
- 2019 Gatra News. Lebih 1000 Orang Ikut Pawai Internasional di Siak. Siak Sri Indrapura
<https://www.gatra.com/>
- 2018 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Hanbook Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018. DKI Jakarta
- 2018 Suara Sindo. Kota Siak Jadi Cagar Budaya Nasional, Menatap Warisan Dunia. Siak Sri Indrapura. [https:// https://www.suarasindo.com/](https://www.suarasindo.com/)



DAFTAR LAMPIRAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK**

bekerja sama dengan



**PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK**



DATA HASIL PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

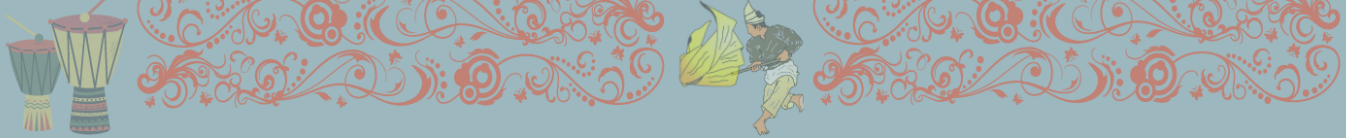
Provinsi Riau

Kode	Nama Dimensi	2018	2019	2020
D1	Ekonomi Budaya	45.76	48.32	42.45
D2	Pendidikan	72.63	77.23	75.29
D3	Ketahanan Sosial Budaya	74.84	75.41	75.64
D4	Warisan Budaya	44.03	45.91	48.00
D5	Ekspresi Budaya	35.12	36.13	36.05
D6	Budaya Literasi	58.20	61.90	65.25
D7	Gender	61.14	60.24	58.82
IPK Provinsi		57.47	59.65	59.50

B. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	2018	2019	2020
X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	0.46	0.48	0.42
X2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 25 tahun ke atas	8.92	9.03	9.14
X2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.11	13.14	13.20
X2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	73.26	73.37	74.57
X2.4	Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya	33.48	41.34	36.79
X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	65.26	73.10	69.63
X2.6	Partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin	90.54	91.86	91.49
X3.1	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	75.87	76.61	77.56
X3.2	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	88.67	90.08	90.51
X3.3	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.	87.66	90.03	91.71
X3.4	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.	94.14	93.94	92.92

Kode	Nama Indikator	2018	2019	2020
X3.5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	82.95	83.86	84.24
X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	38.16	37.52	37.02
X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	23.56	23.59	23.62
X3.8	Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal	78.39	78.45	78.43
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	3.66	3.29	12.88
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	19.34	20.30	25.25
X4.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	56.77	56.52	54.85
X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	39.23	42.87	40.80
X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun	7.85	9.41	7.84
X4.6	Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional	75.26	75.18	68.83
X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	11.43	11.31	11.21
X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	6.48	6.79	6.92
X5.3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.89	1.97	1.92
X5.4	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	19.31	20.08	20.15
X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	49.39	50.49	51.14
X6.2	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	44.37	49.44	56.72
X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	12.96	13.86	13.99
X7.1	Rasio Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	54.51	54.28	55.74
X7.2	Rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/Sederajat	89.79	87.32	93.65
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	39.13	39.13	27.08



DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK**

bekerja sama dengan



**PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK**